

**EFEKTIVITAS GUGUS TUGAS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007**

**Oleh**

**SRI RAHAYU, SH  
A.21211015**

**Prof. Dr. H. Kamarullah, SH. M.Hum**

**Mawardi, SH. M.Hum**

**ABSTRAK**

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sudah menjadi atensi bagi pemerintah. Pemerintah daerah pada dasarnya telah turut serta dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Dengan disahkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak, diharapkan dapat membantu pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak melalui gugus tugas yang dibentuk oleh Gubernur, yang terdiri dari lembaga dan instansi terkait didalamnya diharapkan mampu berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun beberapa faktor menjadi penyebab kurang efektifnya gugus tugas tersebut.

Beberapa faktor tersebut diantaranya kurangnya koordinasi antara instansi dan lembaga didalam gugus tugas, Adanya jaringan sindikat kriminal perdagangan orang melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) di Kalimantan Barat, Faktor Kemiskinan Yang Masih Tinggi di Kalimantan Barat, Faktor Minimnya Lapangan Pekerjaan, dan Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kalimantan Barat.

Beberapa upaya untuk mengefektifkan gugus tugas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak diantaranya meningkatkan koordinasi untuk menjamin terlaksananya Penghapusan Perdagangan Orang terutama perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Barat, melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga / instansi yang tergabung dalam gugus tugas dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana untuk mendukung peran gugus tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, unjuk rasa dan Polri.

### **ABSTRACT**

Human trafficking is one of the transnational crime has become the government's attention. Local governments basically have participated in the implementation of prevention and eradication of human trafficking. With the passage and enactment of West Kalimantan Provincial Regulation No. 7 of 2007 on the Prevention and Combating of Trafficking in Persons Especially Women and Children, is expected to help eradication of trafficking in persons.

Implementation of West Kalimantan Provincial Regulation No. 7 of 2007 on the Prevention and Combating of Trafficking in Persons Especially Women and Children through task force established by the Governor, which consists of institutions and agencies inside be able to coordinate and cooperate in the prevention and eradication of trafficking in persons. However, several factors cause a lack of effective task force

Some of these factors include a lack of coordination between agencies and institutions within the task force, existence of a criminals indicate trafficking through Limit State (transnational) in West Kalimantan, Factors That Poverty Still High in West Kalimantan, lack Employment Factor, and Low Levels of Education in West Kalimantan.

Several attempts to streamline the task force in preventing and combating trafficking in persons by West Kalimantan Provincial Regulation No. 7 of 2007 on the Prevention and Eradication of Trafficking in Persons, especially women and children, including improving coordination to ensure Elimination of Trafficking in Persons, especially women and children in the Province West Kalimantan, to evaluate the performance of institutions / agencies that are members of the task force on the implementation of the prevention and eradication of the Crime of Trafficking in Persons, conducted the development of infrastructure, facilities and infrastructure to support the role of the task force in accordance with the West Kalimantan Provincial Regulation No. 7 of 2007 prevention and Eradication of Trafficking in Persons, especially women and children.

*Keywords:* Trafficking in persons, the task force and West Kalimantan Regional Regulation No. 7 of 2007.

## **Pendahuluan**

Perdagangan terhadap manusia adalah suatu kegiatan *illegal* yang sangat melanggar hak-hak azasi manusia, seperti hak untuk hidup bebas dan bebas dari perlakuan keji yang tidak manusiawi. Hak-hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional antar-pemerintah (*inter-governmental organizations*) maupun non-pemerintah (*non governmental organizations*), orang-perorangan baik secara individual ataupun kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal, maka hak-hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat baik nasional maupun internasional.

Akan tetapi hal yang ideal itu tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran atas hak azasi manusia dalam segala bentuk dan macamnya, dari tingkatan yang paling ringan hingga yang paling berat, hampir selalu terjadi di muka bumi ini. Meskipun secara kuantitatif mungkin peristiwa pelanggaran-pelanggaran itu hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan peristiwa penghormatan dan perlindungan hak-hak azasi manusia, namun peristiwa tersebut menimbulkan rasa khawatir bahkan rasa cemas di kalangan masyarakat.

Dalam konteks pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak azasi manusia atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau secara lebih spesifik adalah terjadinya perdagangan terhadap manusia, akan ada beberapa persoalan mendasar yang dapat diajukan antara lain, siapa-siapa sajakah yang dapat melakukan pelanggaran atau kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia dan dalam wujud apa saja pelanggaran

tersebut dilakukan?, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggung-jawaban kepada si pelaku pelanggaran?, bagaimana proses atau mekanisme pemaksaannya (*enforcement*) terhadap si pelanggar?, dan bagaimana pula kompensasi yang harus diberikan kepada sang korban atas penderitaannya sebagai akibat dari pelanggaran atas dirinya?.

Kejahatan perdagangan orang pada saat ini, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, bahkan dilakukan dengan cara yang cukup canggih dan bersifat lintas negara (*trafficking Internasional*), terutama di daerah-daerah yang dekat dengan perbatasan seperti daerah Kecamatan Sajingan di Kabupaten Sambas dan Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sehingga telah menjadi salah satu bentuk tindakan kejahatan lintas negara yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok yang terorganisir maupun korporasi. Korban diperlakukan seperti barang yang dapat dibeli, dijual kembali dan dipindahkan sebagai obyek komoditas yang menguntungkan pelaku kejahatan, Dalam *konvensi International Labour* (ILO) No. 182 yang mengatur tentang definisi *trafficking* yang tercantum dalam protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah, menanggulangi dan menghukum perdagangan manusia, mendefinisikan sebagai berikut :

Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung, atau menerima tenaga kerja dengan ancaman kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dengan cara menculik, menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan mengiming-ngiming) korban, menyalahgunakan kekuasaan, keinginan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan ijin/persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban, dengan tujuan untuk mengisap dan memeras tenaga (mengekploitasi) korban.

Perdagangan manusia pertama kali dikemukakan pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemukakan Protokol untuk mencegah,

menekan dan menghukum pelaku *trafficking* pada manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak sebagai suplemen Konvensi PBB untuk memerangi kejahatan terorganisasi lintas bangsa (Protokol Palermo).

Krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menyempitnya lapangan pekerjaan, sedangkan pada sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang sangat rumit dipecahkan. Dampak dari hal tersebut menjadikan faktor kriminogen timbulnya berbagai macam kejahatan antara lain kejahatan terhadap nyawa, tubuh, harta benda, dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul berkaitan persoalan ketenagakerjaan adalah tertipunya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Persoalan tertipunya tenaga kerja dapat terjadi sejak saat rekruting maupun pada tahap pelaksanaan perjanjian kerja. Pada umumnya pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak membuat mereka mau melakukan apa saja untuk bertahan hidup, dari kondisi ini banyak dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan, berupa pengiriman tenaga kerja secara *illegal*. sehingga mereka terjatuh pada persoalan-persoalan hukum, untuk menghindari hal tersebut mereka terpaksa mencari perlindungan pada broker-broker tenaga kerja yang mau mempekerjakan walaupun dengan upah yang sangat rendah dan tidak mendapat perlindungan hukum. Bahkan tenaga kerja dieksploitasi habis-habisan dan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, fenomena ini merupakan pelanggaran hukum dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pada umumnya yang menjadi korban adalah kaum wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *trafficking* atau perdagangan manusia, kejahatan semacam

ini tidak saja terjadi di wilayah hukum Negara Indonesia, tetapi juga dapat terjadi pada wilayah negara lain, terutama negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia.

Oleh karena warga negara Indonesia mempunyai potensi munculnya tindak pidana perdagangan orang, maka sesuai dengan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka arahnya adalah untuk melindungi warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Berkaitan dengan *trafficking*, karena korbannya adalah perempuan dan anak, maka erat kaitannya dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1979. Konvensi CEDAW merupakan instrumen hukum pertama yang menetapkan anti diskriminasi terhadap perempuan, mensyaratkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan tidak saja dalam kehidupan publik tetapi juga dalam kehidupan privat. Konvensi CEDAW kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Dalam Artikel 6 CEDAW dinyatakan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran. Untuk memenuhi tuntutan dalam CEDAW, Protokol Palermo, dan dalam rangka mengatasi terjadinya *trafficking* di Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2007 selain memberikan landasan hukum dalam menanggulangi *trafficking*, di mana adanya pengaturan mengenai definisi *trafficking* dan tindakan tegas terhadap pelaku *trafficking*. Dalam UU ini juga memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi perdagangan manusia, di antaranya keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan saat pemeriksaan di depan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka, serta pemberian rehabilitasi medis dan sosial dari negara.

Perdagangan manusia atau *trafficking* sering disebut sebagai bentuk kejahatan transnasional terhadap manusia terutama perempuan dan anak-anak. Disebut kejahatan transnasional karena kegiatannya melintasi batas-batas negara dan dilakukan oleh lebih dari satu pelaku (sindikatan) serta terorganisir (*organized crime*). Istilah *Trafficking* umumnya dipergunakan untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak mulai proses dari perekrutan hingga eksploitasinya yang dinilai bertentangan dengan hak azasi manusia, karena selain merampas kebebasan seseorang juga dapat mengakibatkan penderitaan fisik, mental hingga cacat dan lebih tragis lagi yaitu terenggutnya nyawa para korban *trafficking* tersebut.

Istilah *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai arti "*illegal trade*" atau perdagangan *ilegal*. Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan tindakan serupa perbudakan, yang sudah dilarang di seluruh

dunia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa di Indonesia juga terdapat perbudakan dan perdagangan budak atau *trafficking* manusia.

Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2007, dalam rangka menindak lanjuti Rencana Aksi Nasional yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Rencana Aksi Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak.

Perdagangan orang sebagai obyek perdagangan dan eksploitasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan ancaman terhadap norma-norma kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Letak geografis daerah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia bagian Timur, telah menempatkan daerah ini sebagai wilayah perlintasan orang antar negara melalui darat yang sangat rawan dan rentan terhadap perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

Kegiatan perdagangan orang di Kalimantan Barat sudah pada tingkat yang sangat memprihatinkan dengan korban sebagian besar perempuan dan anak yang tereksplotasi melalui ketenagakerjaan maupun perkawinan, sehingga memerlukan jaminan perlindungan dengan melakukan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban. Hal ini melatarbelakangi dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak.



Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 dinyatakan:

- (1) Dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Gubernur membentuk Gugus Tugas Daerah yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan kalangan akademisi.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
  - a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi serta kerjasama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
  - d. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (3) Gugus Tugas Daerah pemberantasan perdagangan orang dipimpin oleh Wakil Gubernur.
- (4) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja, Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007, dibentuk Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat Tahun 2010-2014 yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) terutama Perempuan dan Anak.

Dalam kenyataannya, Gugus Tugas belum berperan secara maksimal dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat. Tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan

anak yang terjadi di Kalimantan Barat yang ditangani oleh P2TP2A yaitu: pada Tahun 2008 terdapat 37 kasus, tahun 2009 meningkat menjadi 69 kasus, tahun 2010 menurun menjadi 32 kasus, tahun 2011 terdapat 9 kasus, dan tahun 2012 terdapat 8 kasus. Kemudian kasus yang ditangani oleh Polda Kalbar, yaitu: Tahun 2009 terdapat 17 kasus, tahun 2010 terdapat 7 kasus, dan tahun 2011 terdapat 15 kasus.

Berdasarkan perkembangan kasus Tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang terjadi di Kalimantan Barat seperti tersebut di atas, terlihat bahwa peran Gugus Tugas masih belum optimal dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat, sehingga kedepan diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan peran Gugus Tugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat.

### **Permasalahan**

1. Mengapa Gugus Tugas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak belum efektif?
2. Bagaimanakah mengefektifkan Gugus Tugas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak?

## **Pembahasan**

### **1. Belum Efektifnya Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak**

Belum efektifnya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang di Kalimantan Barat disebabkan beberapa faktor baik faktor intern dan faktor ekstern, faktor-faktor tersebut diantaranya sbb :

- 1) Belum efektifnya peran Gugus Tugas yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak.

Beberapa kendala Gugus Tugas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat, diantaranya sbb :

- Koordinasi yang lemah antara Instansi
- Tidak fokus program yang berkelanjutan
- Alokasi anggaran yang sedikit yang berimplikasi terhadap fasilitas pelayanan
- Ruang informasi tidak tersedia di Kabupaten dan desa
- *Shelter* terbatas
- SDM untuk pendampingan korban yang masih kurang<sup>1</sup>

Belum efektifnya Gugus Tugas dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat, disebabkan karena :

- Lembaga yang menangani tidak fokus

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Hairiah, anggota DPD RI Dapil Kalbar.

- Alokasi waktu untuk bertemu antara anggota gugus tugas tidak maksimal.<sup>2</sup>

Beberapa instansi yang masih bersifat egosentris lembaga dan berjalan sendiri-sendiri. Maksimalkan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi Tupoksi dan mencari jalan keluarnya. Selama ini banyak pertemuan yang membahas apa yang sudah dilakukan dan hanya bersifat sosialisasi.<sup>3</sup>

Selain itu belum terbentuknya saran dan prasarana yang harus bangun dalam meningkatkan koordinasi antara beberapa instansi dan lembaga yang tergabung didalamnya, menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

- 2) Adanya jaringan sindikat kriminal perdagangan orang melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) di Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, dimana arus lalu lintas tidak menemui kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan arus keluar masuk orang dan barang menjadi mudah. Berbagai modus operandi yang terjadi diantara perekrutan dan pengiriman manusia (perempuan dan anak), dimulai dari tingkat bawah, yaitu dengan

---

<sup>2</sup> I b l d.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Soneta Ambarsari Administrasi Keuangan LSM di Kota Pontianak

mendatangi wilayah-wilayah sentra pengiriman buruh migran yang berada di desa-desa wilayah kabupaten.

Adapun wilayah sentra pengirimannya adalah di wilayah kabupaten Sambas, kabupaten Sanggau, kabupaten Landak, kabupaten Bengkayang, kabupaten Sintang, kabupaten kapuas Hulu, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Dimulai dari cara calo yang mencari secara langsung kedesa-desa dan tidak jarang melibatkan tokoh masyarakat/aparat desa/dusun setempat yang berperan sebagai perantara dengan keluarga perempuan dan anak. Kemudian calo tersebut membujuk orang tua perempuan dan anak yang bersangkutan, dan jika kesulitan calo tersebut melibatkan perantara tersebut untuk merekrut orang-orang yang akan dieksploitasi keluar negeri.

Berikutnya adalah perempuan dan anak diserahkan kepada pihak lain untuk dibuatkan paspor, dan ditampung ditempat penampungan dan dipindahkan kepada pihak lain (agen/calor Malaysia dan lokal), selanjutnya terjadi transaksi harga, setelah itu calo menawarkan kepada calon majikan yang membutuhkan tenaga kerja dan dipekerjakan diberbagai tempat, seperti rumah tangga, restoran, tempat-tempat hiburan, karaoke dan sebagainya.

Selain itu melalui perkawinan campur antara perempuan (biasanya amoy) Kalimantan Barat dengan pria warga negara asing, seperti diantaranya Taiwan, Hongkong, Singapura melalui layanan pengantin pesanan *mail order bride*, dimana laki-laki warga negara asing datang

sendiri atau dapat juga melalui calo/agen/perantaranya , untuk mencari memilih mempelai perempuan, karena dalam budaya masyarakat etnis tionghoa suatu perkawinan sah ditandai dengan foto bersama kedua mempelai, sehingga tidak harus melengkapi administrasi surat menyurat terlebih dahulu serta para pihak lainnya. Korban dari layanan mail order bride sebagian besar adalah masyarakat dari lapisan bawah.

### 3) Faktor Kemiskinan Yang Masih Tinggi di Kalimantan Barat

Distribusi penduduk miskin Kalimantan Barat pada tahun 2008 menurut data Badan pengawas Statistik Kalimantan Barat menunjukkan tingkat kemiskinan yang cenderung merata didaerah perkotaan dan pedesaan, dimana 15,81 % dari seluruh penduduk perkotaan dan 14,42% di pedesaan. Persentase penduduk miskin tersebar adalah di Kabupaten landak (27,19%) dan Kabupaten Sintang (18,74%).<sup>4</sup> Kemiskinan menyebabkan seseorang berupaya mencari penghidupan yang lebih baik karena pada dasarnya tidak seorangpun ingin hidup dalam kekurangan. Hal inilah yang mendorong penduduk Kalimantan Barat khususnya yang tergolong miskin untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* Kalimantan Barat ada pada peringkat ke 4 dari 4 Propinsi di Kalimantan, dan pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia IPM ada pada peringkat ke 27 dari 33 Provinsi di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Data Badan Pengawas Statistik Provinsi Kalimantan Barat 2012.

Belum meratanya hasil pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sulitnya untuk mengakses serapan lapangan pekerjaan, lamanya pendidikan yang hanya 6 (enam) tahun angkatan kerja hanya tamatan SD, lebih disebabkan sarana infrastruktur jalan yang belum menghubungkan pemukiman sampai ke sekolah-sekolah, *treatment* penanggulangan kemiskinan yang masih parsial.

4) Faktor Minimnya Lapangan Pekerjaan

Angka pengangguran di Kalimantan Barat menurut data BPS tahun 2012 juga cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja di Kalimantan Barat pada tahun 2012 sebanyak 2.143.823 orang, dimana 2.005.927 orang yang bekerja (93,52%).<sup>5</sup> Dengan demikian angkatan kerja penduduk Kalimantan Barat yang belum terserap pada pasar kerja tahun 2012 adalah 138.796 jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pengangguran terbuka sebesar 6,47%. Sedangkan untuk yang bukan angkatan kerja sebanyak 814.561 jiwa, dimana sekitar 28,74% nya karena bersekolah, atau berjumlah 234.125 jiwa, mengurus rumah tangga 428.909 jiwa (52,65%) dan lain-lain sebanyak 151.527 jiwa (15,52%).<sup>6</sup> Pengangguran yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor Provinsi Kalimantan Barat yang berada dibawah kemiskinan. Akibat situasi tersebut kalau ada peluang kerja dengan tawaran gaji yang memadai dengan serta merta mereka terima tanpa berfikir panjang tentang, umur, dimana lokasinya, jenis pekerjaan, dan bentuk pekerjaan yang harus

---

<sup>5</sup> I b l d.

<sup>6</sup> I b l d.

mereka lakukan, karena yang terpenting bekerja dan mendapatkan gaji yang memadai. Keadaan ini merupakan peluang bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (trafficking) perempuan dan anak untuk mengelabui calon korbannya, pelaku trafficker menjadi sangat aktif dan mudah untuk mendapatkan korban, karena populasi untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat besar, sehingga ini sangat mendukung kerja-keja sindikat. Kelompok ini memang sangat rentan untuk menjadi target sasaran sindikat.

Ketersediaan lapangan pekerjaan di tanah air khususnya daerah Kalimantan Barat sangat terbatas, tidak membuat surut masyarakat mengadu nasib mencari peruntungan dengan bekerja diluar negeri. Selain itu Tingkat pendapatan ekonomi yang rata-rata dibawah kemiskinan, miskin dan hampir miskin mendorong masyarakat daerah Kalimantan Barat mencari alternatif menambah pendapatan keluarga untuk bekerja dengan upah/ gaji yang lebih tinggi dibanding upah bekerja di sektor informal di daerah sendiri, maka semakin memotivasi untuk bekerja di luar negeri.

Rendahnya pendapatan keluarga yang hanya mengandalkan hasil pertanian, perkebunan, swasta atau hanya hasil tangkapan ikan, atau hanya kerja serabutan dapat membuat seseorang berkeinginan untuk bekerja keluar negeri karena iming-iming gaji tinggi. Tingginya biaya hidup karena harga kebutuhan bahan pokok berbeda jauh dengan harga di ibukota propinsi.



5) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data Badan Pengawas Statistik Kalimantan Barat, jumlah penduduk Kalimantan Barat tahun 2012 mencapai 4.178.498 jiwa yang terdiri dari 50,575 atau 2.113.096 jiwa adalah perempuan, dan laki-laki adalah 49,43% atau 2.065.402 jiwa. Sementara jumlah anak mencapai 42,12% dari total penduduknya. Dari aspek pendidikan ternyata mayoritas adalah tingkat pendidikan hanya tamatan SD dan SLTP yang mencapai 85,34%.<sup>7</sup> Akibatnya tidak semua pasar kerja terutama yang memerlukan kualifikasi tertentu dan keahlian tertentu untuk dapat menampungnya. Dengan demikian sektor kerja yang dapat menampung lulusan ini, sangat terbatas pada sektor-sektor tertentu, misalnya: buruh pabrik, pekerja rumah tangga, pekerja kebun atau sektor-sektor informal lainnya yang mendapatkan gaji/upah sangat kecil. Demikian juga tingkat buta huruf, jumlahnya sangat mengkhawatirkan khususnya untuk penduduk yang sudah berusia 15-24 tahun yang mencapai 1,99% dari total jumlah penduduk.

Pendidikan yang rendah, kebiasaan habitual, perilaku behavior, budaya kultur, semakin sulit untuk mencari pekerjaan sehingga terdoda untuk bekerja di luar negeri Sarawak Malaysia dengan berbagai cara, baik cara-cara resmi masuk melalui Entikong Tebedu atau tanpa dokumen apapun melalui jalan setapak menuju Sarawak Malaysia, Belum optimalnya peran masyarakat untuk mencegah dan memberantas

---

<sup>7</sup> Ibid.

tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini kesadaran masyarakat sangat strategis untuk memberikan pemahaman pengayaan pengetahuan, tentang resiko-resiko apa yang bisa terjadi bila bekerja di luar negeri, dan bila ingin bekerja keluar negeri ketrampilan apa yang harus dipelajari serta dokumen-dokumen apa yang harus dimiliki.

Tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar semakin sulit untuk mengakses pekerjaan sektor formal yang sangat terbatas, dan pekerjaan sektor informal menjadi pilihan, karena keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor informal ini, juga iming-iming informasi tentang lebih tingginya upah/gaji bekerja di Sarawak (Malaysia), membuat masyarakat Kalimantan Barat mengadu nasib mencari peruntungan bekerja di luar negeri.

Untuk menjamin terlaksanya Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang terutama perempuan dan Anak di Propinsi Kalimantan Barat dibentuk Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang Keterlibatan jaringan sindikat kriminal internasional perdagangan orang melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) tidak terlepas dari posisi tersebut. Khususnya Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara tetangga malaysia, dimana arus lalu lintas tidak menemui kesulitan keluar dan masuk. Hal ini menjadikan arus keluar masuk orang dan barang menjadi mudah.

**2. Mengefektifkan Gugus Tugas Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan**

## **dan anak**

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang perlu ditempuh dengan upaya non penal, sebagai langkah preventif dengan cara melibatkan peran sejumlah elemen, seperti organisasi kewanitaan, kaum agamawan, lembaga pendidikan formal dan non formal, media massa dan institusi terkait. Kebijakan tersebut perlu diterapkan dan di dukung guna menanggulangi maraknya tindak pidana perdagangan orang (khususnya perempuan dan anak)

Berangkat dari kondisi dan realitas tersebut diatas melalui diskusi yang melibatkan *stake holder* dan kajian mendalam, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak, maka guna membangun dan terciptanya suatu sistem koordinasi dan mekanisme kerjasama dalam upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penanganan trafficking perempuan dan anak di Kalimantan Barat, diantaranya dengan cara sbb :

- a) Mensosialisasikan UU nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO ke aparat penegak hukum dan masyarakat luas,serta melakukan desiminasi informasi secara luas sampai ke masyarakat pedesaan dan masyarakat terpencil tentang bahaya dan modus perdagangan orang.
- b) Memaksimalkan fungsi P2TP2A Propinsi Kalbar dalam penanganan korban trafficking termasuk rehabilitasi medis-fsikososial dan Reintegrasi sosial bagi korban dan keluarganya.
- c) Mensosialisasikan dan memperkuat Perda No.7 tahun 2007, SK Gubernur Kalbar, RAD Provinsi RAD Gugus Tugas Trafficking dalam Pelaksanaan Penanggulangan Korban Perdagangan Orang di Kalbar.

- d) Memperkuat jejaring antar LSM yang bergerak pada bidang Anti Perdagangan Orang secara Regional guna memberikan perlindungan perempuan dari Perdagangan Orang..
- e) Memperkuat dokumentasi tentang tindak pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak guna bahan kampanye pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang.
- f) Memfasilitasi Aktivis Anti Perdagangan Orang dalam menjalankan kegiatan penanggulangan korban Perdagangan Orang pada tahap *Preventif, rehabilitative* dan *Reintegrasi social*.<sup>8</sup>

Beberapa upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam melaksanakan peranannya gugus tugas telah melakukan peran masing-masing dalam pencegahan yang menjadi tugas BPA3KB /Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu melakukan sosialisasi tentang *Traicfiking*.<sup>9</sup>

Memperkuat koordinasi antara instansi terkait dengan pihak lembaga non pemerintah dan pihak aparat keamanan (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), seharusnya dapat melakukan sesuatu untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya :

- Penguatan antar instansi
- Fokus program yang berkelanjutan
- Alokasi Anggaran untuk fasilitas
- Pelayanan terhadap korban peningkatan SDM
- Adanya ruang khusus untuk pengaduan korban dan keluarganya

---

<sup>8</sup>Op Cit. Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak.

<sup>9</sup>I b l d.

- Penguatan/ rehabilitasi korban harusnya didekat keluarga, sehingga korban cepat ditangani.<sup>10</sup>

Beberapa Kendala yang dihadapi oleh anggota Gugus Tugas efektif dalam pelaksanaan tugasnya, diantaranya, sbb<sup>11</sup> :

- Tingginya kasus trafiking.
- Kesibukan masing-masing personal, karena tugas pokok dll. yang membuat penanganan sering terhambat.
- Minimnya dana yang tersedia

Beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat antara lain :

- Sosialisasi UU No. 7 tahun 1984 tentang Cendaw
- Sosialisasi UU No. 21 tahun 2007 tentang TPPO
- Sosialisasi UU No. 23 tahun 2003 Perlindungan Anak
- Sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT
- Kegiatan Kemitrausahaan dalam pelatihan keputrian/ menjahit, memayet, dll
- Peningkatan Kesehatan ibu, dalam hal mencegah kelahiran dini, perkawinan dini dan AKI
- Sosialisasi Hak Reproduksi perempuan dan penularan terhadap penyakit yang berbahaya.<sup>12</sup>

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Orang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak di Kalimantan Barat.

- Evaluasi peran dan fungsi masing-masing anggota
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kasubdit Renata Dit Reskrimum Polda Kalbar

<sup>12</sup> Op Cit. Hasil wawancara dengan Sdr Soneta Ambarsari LSM di Kota Pontianak

- Alokasi APBN dan Anggaran lain yang tidak mengikat.<sup>13</sup>

Pembentukan Gugus Tugas dimaksud untuk mempercepat program kegiatan lintas program dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar terkoordinasi dan terintegrasi dalam penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak.

Dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2006 tentang perubahan rencana aksi daerah penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak menjadi Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2010, menjelaskan bahwa :

Untuk menjamin terlaksana Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang terutama perempuan dan Anak di Propinsi Kalimantan Barat dibentuk Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Propinsi Kalimantan Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur, yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Kalimantan Barat, dimana keanggotaan Gugus Tugas terdiri atas Pelindung, Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan Anggota dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2006 tentang perubahan rencana aksi daerah penghapusan perdagangan orang terutama perempuan dan anak menjadi Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2010, menjelaskan bahwa :

Gugus Tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.<sup>15</sup>

Selanjutnya Untuk Pembiayaan Rencana Aksi daerah Penghapusan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak ini, dibebankan pada Anggaran

---

<sup>13</sup> | b | d.

<sup>14</sup> | b | d.

<sup>15</sup> | b | d.

Pendapatan Belanja Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Anggaran masing-masing instansi kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam rangka mengatasi kekurangan sarana dalam bentuk gedung tersendiri dapat menjadi pemenuhan atas pelayanan perawatan korban perdagangan orang. Hal penting yang turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan adalah saran dan prasarana yang baik. Adanya kemauan segenap instansi dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan optimalisasi program Gugus Tugas demi terealisasinya bangunan / gedung Gugus Tugas.

Anggaran pembiayaan dalam gugus tugas disebutkan pada Pasal 23 Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak. Disebutkan bahwa :

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud Pemerintah Provinsi wajib mengalokasikan pembiayaan kegiatan melalui anggaran setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Gubernur wajib mengkoordinasikan pengalokasian pembiayaan kegiatan melalui APBD Kabupaten/Kota guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban di masing-masing Kabupaten/Kota<sup>16</sup>

Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2006 tentang Rencana Aksi daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) perempuan dan anak di Kalimantan Barat menjadi Arah, Pedoman dan Rujukan dalam Upaya Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang perempuan dan anak di Kalimantan Barat dilakukan penyempurnaan dengan rumusan rencana aksi untuk tahun 2010-2014, dengan :

---

<sup>16</sup>Op Cit.pasal 23 Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007..

- a. Mengembangkan sistem pencegahan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak ditingkat kelompok basis masyarakat, terutama. Daerah-daerah yang menjadi sending area (daerah pengirim) dan pintu-pintu daerah domestik perbatasan dan internasional
- b. Diperolehnya peta situasi permasalahan dan data kasus-kasus perdagangan orang khususnya perempuan dan anak di wilayah Kalimantan Barat.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang
- d. Digunakan perspektif HAM dan keadilan Gender.
- e. Peningkatan Pusat Layanan Medis pada Rumah Sakit dalam memberikan Rehabilitasi medis kepada korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pusat layanan krisis untuk perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial korban terutama di daerah-daerah beresiko tinggi.
- g. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, terutama, perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan (ekonomi), kesehatan dan pelayanan sosial.
- h. Terbentuknya perangkat hukum dalam upaya penghapusan perdagangan orang perempuan dan anak (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah dan Surat Keputusan).
- i. Adanya harmonisasi peraturan-peraturan lokal dengan standart kebijakan terkait dengan trafficking perempuan dan anak.
- j. Adanya persamaan persepsi dalam penanganan kasus trafficking ditingkat aparat penegak hukum (Hakim, jaksa, pengacara/advokat dan polisi).
- k. Terjadi penurunan jumlah kasus perdagangan orang (trafficking) secara bertahap serta meningkatnya jumlah kasus yang diproses di pengadilan.
- l. Terjalinnnya dan terbentuknya jaringan kerja net working dalam kemitraan antara propinsi denganpusat, antar propinsi dan antar kabupaten/kota dan juga kerjasama regional dan internasional.
- m. Dialokasikan anggaran untuk pencegahan, implementasi kebijakan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam APBD pemerintah propinsi dan kabupaten/kota setiap tahunnya.<sup>17</sup>

Pada Pasal 15 Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak, dijelaskan bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan kemudahan pelayanan bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bekerja ke

---

<sup>17</sup>Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2006 tentang Rencana Aksi daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*trafficking*) perempuan dan anak di Kalimantan Barat



luar daerah atau ke luar negeri untuk memperoleh informasi, mendapat pendidikan/pelatihan keterampilan dan dokumen perjalanan.

- (2) Pemerintah Provinsi wajib menentukan teknis dan standar pendidikan/pelatihan keterampilan calon tenaga kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib menentukan pintu-pintu resmi/pelabuhan darat bagi keberangkatan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri.
- (4) Dalam menyediakan fasilitas pelayanan bagi tenaga kerja yang bermasalah, Pemerintah Provinsi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>18</sup>

Pencegahan Perkawinan dengan Tujuan Eksploitasi, disebutkan pada Pasal 11

Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak, dijelaskan bahwa :

- (1) Segala bentuk perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia dan atau dengan Warga Negara Asing yang patut diduga mengakibatkan eksploitasi terhadap perempuan wajib dicegah.
- (2) Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah Pejabat Pencatat Nikah, aparat penegak hukum atau pihak berwajib, serta masyarakat dan keluarga.<sup>19</sup>

Selain itu Peran Serta Masyarakat juga sangat membantu dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 16 Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 16 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak, menyebutkan bahwa :

- (1) Masyarakat wajib berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan memberikan info dan atau melaporkan adanya perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban melalui upaya pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Op. Cit Pasal 15. Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007...

<sup>19</sup>Op. Cit Pasal 11. Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007

<sup>20</sup>I b l d. Pasal 16. Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007

Upaya pencegahan Pencegahan Eksploitasi Tenaga Kerja terdapat pada Pasal 7 Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak, menjelaskan sbb :

- (1) Setiap perempuan yang akan bekerja ke dalam dan ke luar daerah atau ke luar negeri wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atau Lurah tempat tinggalnya.
- (2) Kepala Desa atau Lurah yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengeluarkan SKBLD/LN.
- (3) Setiap SKBLD/LN yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Camat setempat untuk mendapatkan pengesahan
- (4) Camat wajib melaksanakan pengadministrasian SKBLD/LN sebagaimana dimaksud pada ayat dan melaporkan secara berkala kepada Bupati/Walikota.
- (5) Laporan yang disampaikan Camat kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), khususnya bagi pekerja ke Luar Daerah dan Ke Luar Negeri secara berkala dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan bagi perempuan yang diterima bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di luar daerah.<sup>21</sup>

Dalam upaya pemberantasan perdagangan orang pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan

---

<sup>21</sup> I b l d. Pasal 7 Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.,(Cet. Ke-10), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 5

semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

a. Secara Yuridis:

Setiap peraturan hukum yang berlaku haruslah bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya, Undang-Undang di Indonesia dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Secara Sosiologis:

Bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan/ diberlakukan menurut “*Anerkennungstheorie*”, “*The recognition Theory*”). Teori ini bertolak belakang dengan “*Machttheorie*”, *Power Theory*”) yang menyatakan, bahwa peraturan hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.

c. Secara Filosofis:

Apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidde*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Dalam negara Indonesia, cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (role). Kedudukan social merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakkan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena :

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

## 3. Faktor sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.

## 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi,

politik, dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap terhadap norma-norma
- d. Perilaku hukum.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

### **Penutup**

Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat melalui Gugus Tugas yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan Peraturan Daerah propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak.

2. Beberapa Faktor Penyebab Belum Efektifnya Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak, diantaranya :
  - a. Belum Efektifnya Peran Gugus Tugas yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak.
  - b. Adanya jaringan sindikat kriminal perdagangan orang melalui Pos Lintas Batas Negara (transnasional) di Kalimantan Barat.
  - c. Faktor Kemiskinan Yang Masih Tinggi di Kalimantan Barat
  - d. Faktor Minimnya Lapangan Pekerjaan
  - e. Rendahnya Tingkat Pendidikan di Kalimantan Barat;
3. Upaya Mengefektifkan Gugus Tugas Dalam Melakukan Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama perempuan dan anak :
  - a. Melakukan evaluasi peran dan fungsi masing-masing anggota Instansi/lembaga di Gugus Tugas
  - b. Mengalokasikan anggaran dan pembangunan fasilitas dan prasarana dalam meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga yang berada di Gugus Tugas.
  - c. Melakukan penegakan hukum dalam memberantas pelaku tindak pidana penyelundupan orang untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya

## Daftar Pustaka

- A Hamid S. Attamini. Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Menyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi UI. Jakarta. 1999.
- Alexander Seran, *Moral Politik Hukum*, Obor, Jakarta.1999,
- BagirManan, *BeberapaMasalahHukum Tata Negara Indonesia*,Bandung: Alumni, 1993
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Analisa Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, Dalam Majalah Administrator No. 5 dan 6 Tahun IV. 1976.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Tanpa Tahun, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta.
- Dunn, William, N.*Pengantar Analisis Kebiajakn Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.1994
- Eddy Wibowo, et.al.*Hukum dan Kebijakan Publik*, Penertbit YPAPI, Yogyakarta.2004,
- Irfan Islamy, M.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 1997.
- Istislam, 2000, *Kebijakan dan Hukum Lingkungan Sebagai Instrumen Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*, Arena Hukum, Nomor 10 Tahun Keempat, Jakarta.2000,
- Jimly Assiddiqie. Perihal Undang-undang. Konstitusi Press. Jakarta. 2006
- \_\_\_\_\_,*Hukum Acara Pengujian Undang-undang*. Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- M. Grindie dalam Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. 1997.
- Marbun, S.F., dan Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.2000,
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.1996,

- Muchsindan Imam Koeswahyono, *AspekKebijaksanaanHukumPenatagunaan Tanah danPenataanRuang*, SinarGrafika, Jakarta.2008.
- Notonagoro, *PembukaanUndang-UndangDasar 1945 (PokokKaidahFundamental Negara Indonesia)dalamPancasilaDasarFalsafah Negara*, CetakanKetujuh, BinaAksara,Jakarta. 1988
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.1987,
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya. Arkola. 1994
- Prajudi Atmosudirdjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984.
- Romli Atmasasmitha. Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum. Bandung. Mandar Maju 2011.
- \_\_\_\_\_,Pengantar Hukum Pidana International, Refika Aditama, Bandung,2006
- RosenbergRuth, PerdaganganPerempuandanAnak di Indonesia, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), 2003.
- SatjiptoRahardjo, *MembedahHukumProgresif*, Kompas, Jakarta: 2007
- Soekanto, Soerjono, tanpa tahun, *Prespektis Teoritis studi Hukum Dalam Masyarakat*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta. Rajawali. 1983.
- \_\_\_\_\_. Sosiologi; Suatu Pengantar. Bandung. Rajawali. Press. 1996
- \_\_\_\_\_, Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenegakanHukum.,(Cet. Ke-10), PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, EfektifitasHukumdanPenerapanSanksi,Bandung: RemadjaKarya, 1985.
- \_\_\_\_\_, Pokok-PokokSosiologiHukum, Cet. Keduabelas, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2002
- Soerjonosoekantodan Mustafa Abdullah, *SosiologiHukumdalamMasyarakat*, cet. Ketiga, Jakarta: Rajawali Press, 1987



Syarif. Amiroedidin Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Teknik Membuatnya). Rineka Cipta. Bandung. 1997

UsmanNurdin. KonteksImplementasiBerbaisisKurikulum. Yogyakarta:BintangPustaka. 2002.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Zaenuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang*PerlindunganAnak*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang*Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentangPencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan OrangTerutama Perempuan Dan Anak.

PeraturanGubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang*PerubahanAtasPeraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (trafficking) terutamaPerempuan dan Anak*.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)